



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2023);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
7. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
14. Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

BAB II  
ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Anggaran Kas SKPD kepada kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas SKPD.
- (4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrument verifikasi sebagai berikut :
  - a. Sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD.
  - b. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah di verifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah diterima.

Pasal 3

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap bulan.
- (3) Rincian Anggaran Kas per bulan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SURAT PEYEDIAAN DANA

Pasal 4

- (1) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan :
  - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
  - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.
- (3) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodic

- (4) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
- Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
  - Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
  - Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya

BAB IV  
PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan Pergeseran anggaran kas pada SKPD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- (3) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rencana objek dan/ atau sub rencana obyek.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M.Si  
PEMBINA TK I / IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

**RINCIAN ANGGARAN KAS PER BULAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PENDAPATAN	1,400,653,951,750	74,555,331,009	107,475,129,569	114,317,006,216	151,574,669,440	130,386,502,238	141,742,508,003	135,681,908,975	120,289,135,329	92,680,953,116	163,281,112,926	88,900,586,937	79,769,107,993
4	1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	163,266,571,524	11,641,604,983.50	12,433,027,577.83	12,433,027,577.83	14,564,575,411.17	11,690,540,077.83	14,333,649,112.33	17,249,237,120.83	15,076,136,612.33	14,690,540,077.83	13,773,152,816.83	12,690,540,077.83	12,690,540,077.83
4	2 PENDAPATAN TRANSFER	1,210,548,112,388	62,913,726,025.67	91,687,193,511.75	98,529,070,157.92	133,655,185,549.25	117,577,659,333.83	125,172,253,237.08	116,196,066,201.33	101,858,090,236.42	76,872,110,211.75	147,271,354,455.75	73,973,441,205.50	64,841,962,261.75
4	3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,839,267,838		3,354,908,479.75	3,354,908,479.75	3,354,908,479.75	1,118,302,826.58	2,236,605,653.17	2,236,605,653.17	3,354,908,479.75	1,118,302,826.58	2,236,605,653.17	2,236,605,653.17	2,236,605,653.17
	JUMLAH PENDAPATAN	1,400,653,951,750	74,555,331,009.17	107,475,129,569.33	114,317,006,215.50	151,574,669,440.17	130,386,502,238.25	141,742,508,002.58	135,681,908,975.33	120,289,135,328.50	92,680,953,116.17	163,281,112,925.75	88,900,586,936.50	79,769,107,992.75
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	20,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,420,653,951,750	94,555,331,009	107,475,129,569	114,317,006,216	151,574,669,440	130,386,502,238	141,742,508,003	135,681,908,975	120,289,135,329	92,680,953,116	163,281,112,926	88,900,586,937	79,769,107,993
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGELUARAN PER BULAN	1,420,653,951,750	94,555,331,009.17	107,475,129,569.33	114,317,006,215.50	151,574,669,440.17	130,386,502,238.25	141,742,508,002.58	135,681,908,975.33	120,289,135,328.50	92,680,953,116.17	163,281,112,925.75	88,900,586,936.50	79,769,107,992.75
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGELUARAN PER TIGA BULAN	1,420,653,951,750			316,347,466,794.00			423,703,679,681.00			348,651,997,420.00			331,950,807,855.00
5	BELANJA DAERAH	1,417,153,951,750	91,358,907,436	102,052,977,792	122,935,581,566	151,318,675,931	129,104,708,923	143,280,294,827	134,700,731,679	120,920,589,935	93,030,675,806	142,259,150,202	89,977,908,051	96,213,749,602
	Dinas Pendidikan	376,070,114,033	20,418,240,706.00	25,460,379,706.00	20,651,279,506.00	43,783,054,506.00	20,480,087,806.00	25,165,896,506.00	61,069,873,568.00	37,056,846,506.00	21,049,644,706.00	53,767,701,506.00	20,434,269,006.00	26,732,840,005.00
	Dinas Kesehatan	123,000,195,905	8,897,187,376.00	16,144,377,976.00	8,821,146,776.00	13,181,649,568.00	14,153,040,576.00	8,973,820,076.00	9,791,057,074.00	15,421,756,059.00	6,962,864,176.00	7,113,740,376.00	6,752,421,583.00	6,787,134,289.00
	RSUD Menggala	93,555,784,064	6,951,648,304.00	6,903,648,304.00	7,768,556,804.00	15,303,611,808.00	8,327,372,184.00	6,903,648,304.00	6,903,648,304.00	6,901,056,908.00	6,898,148,304.00	6,898,148,304.00	6,898,148,304.00	6,898,148,232.00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146,373,097,317	1,626,628,150.00	1,632,009,300.00	23,743,603,550.00	5,822,828,604.00	29,021,538,550.00	38,781,359,210.00	3,767,841,633.00	10,310,607,041.00	6,008,223,500.00	16,195,416,000.00	5,453,734,999.00	4,009,306,780.00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8,303,292,098	497,181,943.00	486,098,443.00	953,558,043.00	754,181,943.00	675,570,648.00	1,430,125,783.00	737,653,243.00	504,953,243.00	565,394,243.00	524,702,446.00	545,306,343.00	628,565,777.00
	Satuan Polisi Pamong Praja	11,855,320,707	903,832,740.00	958,513,940.00	947,000,340.00	1,445,117,626.00	1,075,034,781.00	932,544,140.00	906,846,590.00	923,630,290.00	904,303,390.00	936,732,090.00	939,277,390.00	982,487,390.00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,448,528,243	328,099,275.00	355,864,075.00	334,279,275.00	516,955,549.00	383,469,675.00	330,864,075.00	472,283,549.00	330,864,075.00	352,399,275.00	390,677,476.00	327,218,175.00	325,553,769.00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4,892,997,237	387,095,770.00	389,375,770.00	424,495,770.00	452,795,770.00	496,115,770.00	385,942,270.00	351,071,770.00	422,336,670.00	398,664,770.00	395,653,070.00	387,924,070.00	401,525,767.00
	Dinas Sosial	9,166,958,012	550,762,471.00	554,026,921.00	723,759,971.00	1,876,944,142.00	599,516,721.00	587,469,221.00	555,011,321.00	561,613,221.00	536,527,221.00	1,571,061,421.00	549,056,321.00	501,209,060.00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,298,643,022	282,429,933.00	366,695,433.00	341,134,433.00	480,620,809.00	292,344,733.00	488,422,809.00	329,466,133.00	334,254,133.00	317,858,333.00	354,502,333.00	303,167,633.00	407,746,307.00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,914,537,213	357,928,314.00	348,599,314.00	336,209,314.00	335,759,314.00	775,650,432.00	478,053,757.00	315,568,450.00	336,076,814.00	364,051,314.00	382,371,814.00	543,455,814.00	340,812,562.00
	Dinas Ketahanan Pangan	4,292,396,048	325,435,258.00	306,351,559.00	420,081,967.00	328,865,942.00	312,907,260.00	314,225,060.00	552,584,649.00	316,024,960.00	329,054,160.00	405,419,559.00	374,303,359.00	307,142,315.00
	Dinas Lingkungan Hidup	9,577,894,498	620,272,253.00	675,437,753.00	1,557,286,511.00	766,442,111.00	767,709,498.00	791,436,498.00	668,150,511.00	851,033,811.00	664,017,300.00	826,489,407.00	625,116,838.00	764,502,007.00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,363,573,329	361,529,918.00	383,390,018.00	448,072,543.00	369,858,393.00	689,498,412.00	379,746,320.00	363,868,920.00	720,848,415.00	374,561,522.00	1,505,000,823.00	393,983,522.00	373,214,523.00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	8,063,912,780	452,366,541.00	828,895,811.00	689,512,375.00	694,582,709.00	511,034,600.00	861,338,986.00	580,071,026.00	445,931,167.00	762,234,124.00	1,295,207,511.00	496,964,439.00	445,773,491.00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11,089,358,100	296,944,867.00	501,959,880.00	1,268,722,480.00	3,130,655,707.00	354,481,280.00	794,082,968.00	338,617,547.00	361,555,580.00	1,247,651,580.00	2,171,322,547.00	319,063,482.00	304,300,182.00
	Dinas Perhubungan	9,888,049,888	805,116,050.00	757,926,150.00	862,359,950.00	1,037,055,750.00	749,204,150.00	781,188,850.00	963,901,950.00	821,551,150.00	758,244,350.00	882,929,450.00	749,004,450.00	719,567,638.00

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	ANGGARAN	TRIWULAN I				TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,258,548,183	1,449,346,546.00	477,119,146.00	2,267,605,146.00	776,518,892.00	1,082,107,446.00	1,489,590,092.00	1,211,538,946.00	505,846,546.00	521,904,346.00	1,013,350,846.00	2,251,106,546.00	1,212,513,685.00
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6,332,589,307	373,000,412.00	699,651,212.00	678,568,812.00	714,892,502.00	671,078,712.00	507,952,412.00	607,077,602.00	397,822,712.00	391,220,712.00	513,331,012.00	382,347,712.00	395,645,495.00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,787,260,078	473,974,321.00	484,047,139.00	528,159,742.00	787,755,124.00	523,731,236.00	818,294,620.00	733,363,276.00	549,335,710.00	518,122,310.00	441,830,548.00	496,458,876.00	432,187,276.00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6,554,406,030	274,065,690.00	326,270,690.00	463,893,690.00	1,089,500,185.00	1,273,858,190.00	284,638,190.00	529,881,085.00	569,059,190.00	282,008,190.00	286,308,190.00	281,708,190.00	893,214,550.00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,753,059,676	275,749,776.00	284,716,376.00	318,354,576.00	431,046,327.00	297,986,576.00	401,996,927.00	298,380,876.00	268,104,376.00	268,840,576.00	376,891,056.00	273,435,076.00	257,557,158.00
	Dinas Perikanan	5,357,032,586	396,493,687.00	442,050,087.00	383,388,687.00	628,654,973.00	358,729,087.00	587,538,573.00	559,756,887.00	413,189,087.00	379,786,287.00	417,970,687.00	413,725,888.00	375,748,656.00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,863,424,905	544,280,243.00	589,725,041.00	763,109,941.00	774,883,822.00	601,869,441.00	444,660,241.00	869,586,222.00	590,228,241.00	416,375,241.00	438,017,041.00	408,875,241.00	421,814,190.00
	Dinas Pertanian	20,776,106,224	1,091,570,030.00	1,132,214,830.00	1,801,892,630.00	3,322,078,678.00	2,522,548,678.00	2,468,066,230.00	1,131,658,630.00	2,378,300,230.00	1,167,748,677.00	1,404,176,900.00	1,111,323,657.00	1,244,527,054.00
	Dinas Perdagangan	5,088,015,937	422,246,779.00	342,795,879.00	793,170,879.00	493,001,077.00	338,670,879.00	565,221,670.00	335,730,879.00	454,988,879.00	354,860,879.00	343,600,879.00	319,430,879.00	324,296,379.00
	Sekretariat Daerah	78,308,376,723	4,429,554,741.00	5,972,596,479.00	7,908,772,972.00	12,806,512,366.00	5,752,537,426.00	8,976,921,980.00	5,375,058,950.00	4,952,047,917.00	5,515,047,092.00	7,175,593,435.00	4,380,115,791.00	5,063,617,574.00
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	68,216,457,967	5,062,482,859.00	5,205,475,359.00	6,317,639,459.00	6,243,642,709.00	5,510,015,459.00	7,735,659,896.00	5,133,920,409.00	4,449,716,363.00	5,851,210,259.00	5,317,704,859.00	5,295,401,959.00	6,093,588,377.00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,779,317,224	827,804,901.00	944,085,701.00	1,284,244,201.00	1,880,866,511.00	1,168,776,101.00	1,490,446,211.00	847,934,301.00	891,740,901.00	805,399,876.00	929,619,476.00	845,324,501.00	863,074,543.00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	265,913,933,742	22,666,195,539.00	22,037,571,139.00	22,320,690,739.00	23,509,373,919.00	22,017,817,839.00	22,299,476,775.00	21,776,471,673.00	21,755,102,739.00	21,759,000,939.00	21,684,163,139.00	21,704,304,139.00	22,383,765,163.00
	Badan Pendapatan Daerah	15,117,274,733	3,974,822,129.00	981,225,094.00	1,628,264,133.00	1,107,622,898.00	843,982,094.00	1,353,498,557.00	838,327,394.00	837,007,094.00	1,252,580,503.00	827,640,094.00	820,657,094.00	651,647,649.00
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8,182,329,039	680,772,645.00	680,772,648.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	680,772,645.00	693,829,941.00
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4,504,485,703	277,561,751.00	293,693,951.00	432,147,363.00	290,848,351.00	410,573,751.00	530,438,363.00	300,890,751.00	505,292,951.00	408,930,951.00	495,746,151.00	292,893,751.00	265,467,618.00
	Inspektorat	14,490,653,223	1,445,522,540.00	1,264,814,939.00	1,189,366,939.00	1,170,206,540.00	1,171,333,440.00	1,195,601,964.00	1,179,759,540.00	1,238,849,907.00	1,184,716,190.00	1,165,080,790.00	1,158,714,340.00	1,126,686,094.00
	Kecamatan Menggala	4,036,392,426	309,868,256.00	329,755,856.00	308,750,306.00	401,200,081.00	325,452,606.00	399,661,281.00	320,631,206.00	327,210,306.00	316,592,906.00	371,432,306.00	315,500,356.00	310,336,960.00
	Kecamatan Banjar Agung	2,574,169,609	174,628,522.00	208,547,722.00	192,820,772.00	283,093,192.00	228,713,122.00	179,838,572.00	275,067,090.00	221,489,775.00	174,627,825.00	286,085,522.00	174,629,022.00	174,628,473.00
	Kecamatan Gedung Aji	1,844,859,573	119,815,065.00	202,196,125.00	127,084,175.00	130,282,325.00	242,520,888.00	185,414,418.00	138,066,845.00	161,631,245.00	126,464,863.00	137,145,990.00	156,104,190.00	118,133,444.00
	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	1,748,732,261	115,368,024.00	117,183,374.00	165,024,199.00	180,332,055.00	121,449,324.00	155,949,974.00	176,665,830.00	120,301,674.00	175,331,049.00	123,568,024.00	163,236,249.00	134,322,485.00
	Kecamatan Gedung Meneng	1,900,269,305	130,835,901.00	138,116,301.00	195,653,951.00	204,312,245.00	134,605,552.00	133,865,152.00	193,453,746.00	177,178,553.00	130,223,453.00	191,617,652.00	132,598,903.00	137,807,896.00
	Kecamatan Penawar Tama	2,035,917,080	157,623,175.00	145,888,775.00	145,730,525.00	163,139,075.00	227,125,646.00	144,040,525.00	156,744,175.00	158,315,425.00	158,315,425.00	158,179,225.00	150,098,175.00	150,278,913.00
	Kecamatan Rawa Jitu Timur	1,890,441,365	128,769,286.00	151,399,086.00	154,122,386.00	205,115,143.00	130,866,586.00	155,891,986.00	200,815,144.00	146,431,205.00	182,271,305.00	146,268,205.00	133,240,113.00	155,250,920.00
	Kecamatan Banjar Margo	2,162,364,983	152,802,545.00	202,708,945.00	210,520,745.00	239,740,855.00	150,051,895.00	232,935,855.00	207,018,495.00	183,430,995.00	148,641,116.00	149,164,983.00	147,218,085.00	138,130,469.00
	Kecamatan Penawar Aji	1,456,326,237	103,721,762.00	131,942,728.00	117,971,528.00	187,667,506.00	105,949,028.00	106,590,328.00	164,913,589.00	151,148,759.00	102,003,056.00	132,883,024.00	85,051,132.00	66,483,797.00
	Kecamatan Menggala Timur	2,012,562,610	135,016,194.00	142,223,894.00	156,133,394.00	258,694,290.00	143,864,194.00	220,331,631.00	139,048,994.00	147,989,594.00	147,281,494.00	197,379,494.00	188,967,494.00	135,631,943.00
	Kecamatan Rawa Pitu	2,023,060,714	154,058,669.00	159,921,469.00	154,660,269.00	214,165,812.00	180,256,869.00	137,840,069.00	226,829,512.00	159,762,869.00	152,349,469.00	141,298,469.00	203,747,769.00	138,169,469.00
	Kecamatan Banjar Baru	1,847,694,292	122,221,199.00	144,701,099.00	152,048,299.00	189,917,753.00	119,960,599.00	125,110,599.00	199,567,051.00	158,047,099.00	129,810,999.00	190,797,699.00	151,229,398.00	164,282,498.00
	Kecamatan Dente Teladas	1,387,081,183	93,978,893.00	93,978,893.00	97,578,893.00	231,812,132.00	108,978,893.00	93,978,893.00	196,880,086.00	93,978,893.00	93,978,893.00	93,978,893.00	93,978,893.00	93,978,928.00
	Kecamatan Meraksa Aji	1,601,566,545	104,711,153.00	113,784,953.00	127,327,053.00	241,217,506.00	113,502,903.00	239,436,956.00	131,265,403.00	106,554,853.00	105,482,603.00	112,978,303.00	102,005,953.00	103,298,906.00
	Kecamatan Gedung Aji Baru	1,500,282,101	160,041,328.00	93,348,503.00	101,048,503.00	186,339,828.00	128,653,536.00	93,348,503.00	205,789,661.00	93,348,503.00	93,348,503.00	158,318,228.00	93,348,503.00	93,348,502.00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	7,694,307,692	467,303,006.00	464,904,006.00	478,004,406.00	1,012,488,363.00	1,751,791,206.00	465,120,006.00	568,339,277.00	456,995,906.00	541,584,906.00	539,180,304.00	477,941,803.00	470,654,503.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,417,153,951,750	91,358,907,436	102,052,977,792	122,935,581,566	151,318,675,931	129,104,708,923	143,280,294,827	134,700,731,679	120,920,589,936	93,030,675,806	142,259,150,202	89,977,908,051	96,213,749,602

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	PEMBIAYAAN	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,500,000,000												
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,500,000,000											3,500,000,000.00	
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1,420,653,951,750	91,358,907,436.00	102,052,977,792.00	122,935,581,566.00	151,318,675,931.00	129,104,708,923.00	143,280,294,827.00	134,700,731,679.00	120,920,589,935.00	93,030,675,806.00	142,259,150,202.00	93,477,908,051.00	96,213,749,602.00
JUMLAH ALOKASI BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PER BULAN		1,420,653,951,750	91,358,907,436.00	102,052,977,792.00	122,935,581,566.00	151,318,675,931.00	129,104,708,923.00	143,280,294,827.00	134,700,731,679.00	120,920,589,935.00	93,030,675,806.00	142,259,150,202.00	93,477,908,051.00	96,213,749,602.00
JUMLAH ALOKASI BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PER TRIWULAN		1,420,653,951,750			316,347,466,794.00			423,703,679,681.00			348,651,997,420.00			331,950,807,855.00
SALDO KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG		-												

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARISH, MH, M.Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003